



Judul : Rp 15 T disiapkan untuk bencana
Tanggal : Jumat, 04 Januari 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 9

Rp 15 T Disiapkan untuk Bencana

● AHMAD FIKRI NOOR,
RIZKY SURYARANDIKA

Komisi V menilai perlu penambahan anggaran BMKG.

JAKARTA. — Kementerian Keuangan menyampaikan, telah menyiapkan dana hingga Rp 15 triliun untuk penanganan bencana pada 2019. Dana tersebut telah dianggarkan dalam dana cadangan bencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"Pagunya meningkat untuk antisipasi bencana kemudian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di Jakarta, Rabu (2/1). Askolani mengatakan, anggaran tersebut bersifat *on-call* yang dapat terpakai sewaktu-waktu dan tidak terikat pada institusi tertentu untuk memudahkan pencairan.

"Jadi tidak ada kekhawatiran mengenai itu dan tidak ada alasan anggaran kecil, karena beberapa pun dibutuhkan, pasti akan terpenuhi," ujarnya. Selain dana penanganan bencana, Kemenkeu juga akan menyiapkan dana abadi terkait bencana. Kemenkeu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk menjalankan skema *pooling fund* tersebut.

"Dananya akan dikelola BLU (Badan Layanan Umum)," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara. Kendati demikian, pembentukan BLU tersebut masih perlu menunggu aturan yang saat ini tengah diselesaikan. Suahasil me-

nyampaikan, lembaga tersebut direncanakan sudah akan mulai beroperasi pada tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mekanisme dana penanganan bencana bisa dicairkan melalui proses verifikasi. Proses verifikasi itu mencakup penilaian kembali terhadap kebutuhan dana atas proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan untuk menebak terjadinya penyalahgunaan anggaran.

"Penanganan bencana itu melalui mekanisme *on-call*. Kalau kita mengeluarkan untuk bantuan rumah, kita verifikasi berapa yang rusak berat atau ringan. Begitu selesai verifikasi, kita keluarkan," ujarnya. Ia juga mengatakan, pagu anggaran di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak seluruhnya merefleksikan kebutuhan belanja untuk penanganan bencana alam.

Pencairan dana dari *pooling fund* juga dapat dilakukan bergantung dari skala besarnya bencana alam, jumlah korban; ataupun tingkat kerusakan daerah tersebut. Selain itu, pemerintah mulai mengasuransikan semua barang milik negara pada 2019 sebagai bentuk antisipasi dari dampak buruk yang ditimbulkan bencana alam.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido mengusulkan, supaya pemerintah mengalokasikan APBN sebesar Rp 20 triliun untuk Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Anggaran tersebut bakal digunakan untuk penguatan alat peringatan dini bencana.

Rendy menilai, nominal tersebut ideal bagi BMKG. Sebab, menurut dia, BMKG berfungsi

penting dalam peringatan dini bencana. "Untuk BMKG saja 20 triliun. Kan yang potensi, potensi untuk memberi tahu keadaan (saat terjadi bencana) ini termasuk dengan teman-teman geofisika," katanya dalam diskusi, Kamis (3/1).

Ia menyebut, negara lain mengalokasikan anggaran secara masif pada badan sejenis BMKG. Ia menaksir, beberapa negara sampai memberikan dua hingga tiga persen dari anggaran belanjanya untuk lembaga kebencanaan. "Sebenarnya, di luar negeri itu dua sampai tiga persen dari APBN mereka," kata politikus PDIP itu.

Diketahui, alokasi anggaran bagi BMKG sebesar Rp 1,75 triliun dari nota keuangan 2019. Jumlah tersebut sudah naik 9,37 persen daripada tahun lalu. Walau begitu, Rendy menilai, angka itu masih minim untuk BMKG. "Itu sebenarnya (anggarannya kecil) karena mereka telat memberi tahu kepada kita," katanya menegaskan.

Di sisi lain, Kepala Deputi Geofisika BMKG Muhammad Sadly memandang usulan Komisi V DPR soal jumlah anggaran BMKG terlalu besar. Ia merasa kebutuhan lembaganya tak mencapai Rp 20 triliun. "Angka 20 triliun itu mungkin untuk semua. Kalau untuk BMKG terlalu besar mungkin itu untuk institusi lain karena kami enggak jalan sendiri saja," kata dia.

Ia malah menyebut, kebutuhan anggaran BMKG hanya sekitar Rp 7 triliun. "Yang kami ajukan Rp 7 triliun itu tidak fix. Karena itu, kita ajukan lagi bisa saja bertambah lagi karena kebutuhan untuk sosialisasi lagi karena itu belum tentu," kata dia.

■ antara ed: fitriyan zamzami